



RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Review Renstra

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan pasal 45 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan kondisi umum perangkat daerah, kondisi keuangan perangkat daerah dan identifikasi permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada pada Perangkat Daerah (PD)

Renstra DPMPTSP Kota Surabaya 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana stretegis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Surabaya tahun 2021 – 2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DMPPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kota Surabaya tahun 2022 – 2026.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), sesuai pendekatan yang dimaksud, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Resntra dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dan koordinasi dengan bidang – bidang dan pihak yang terkait.

Penyesuaian (reviu) dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya ini sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022- 2026.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

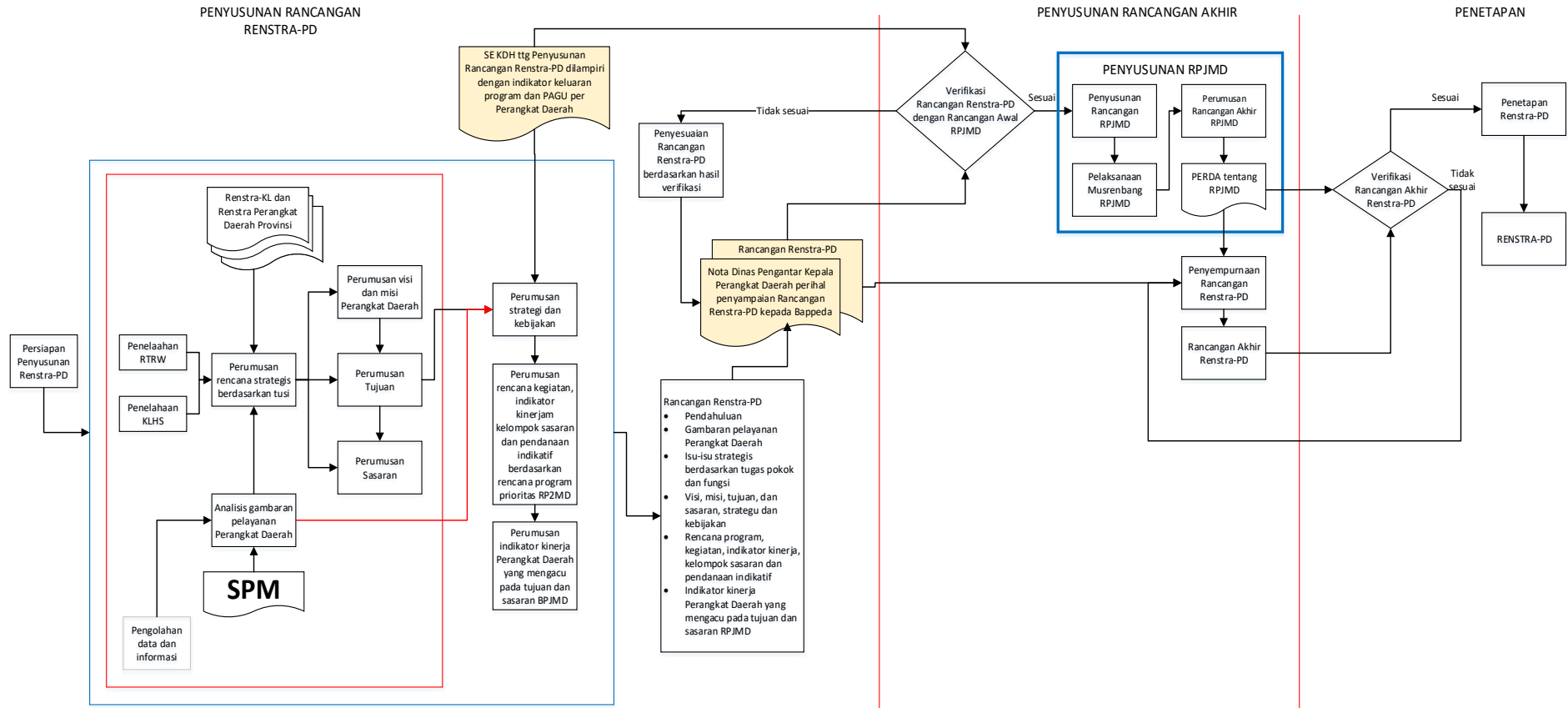
Renstra-PD Tahun 2021 - 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adapun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



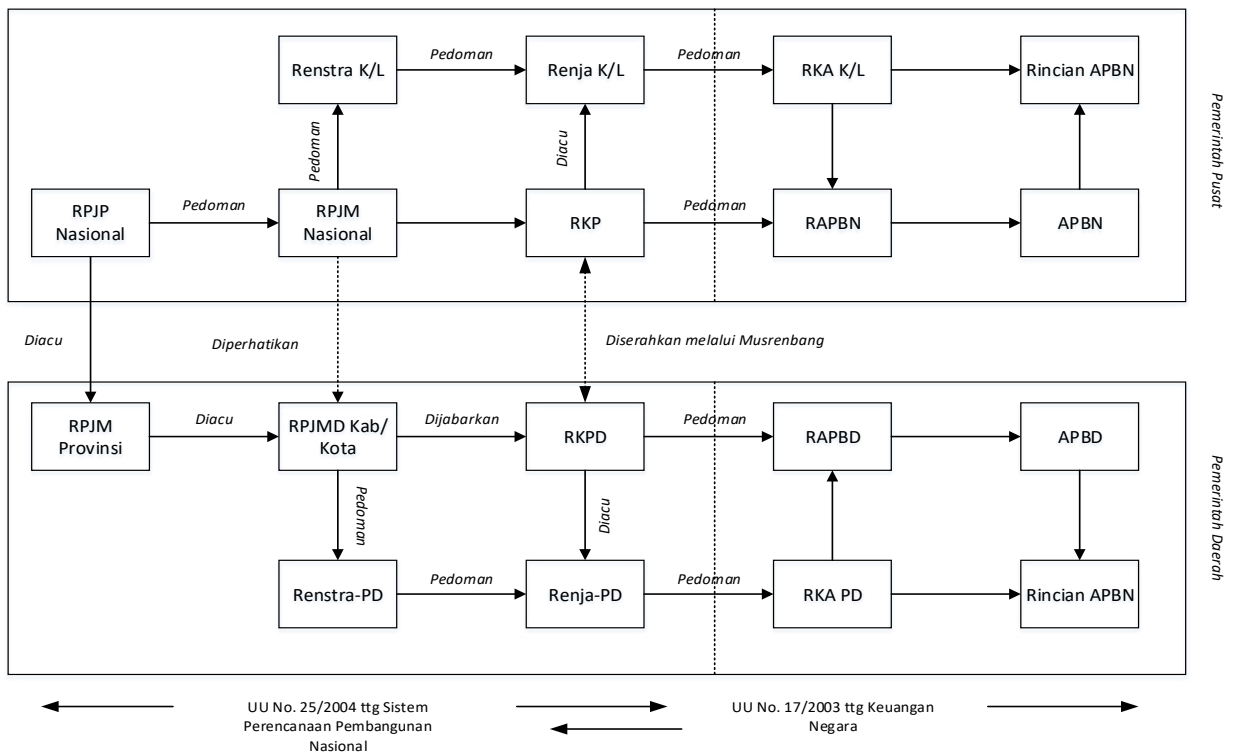
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra-PD Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2022 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024. Jadi, RPJMD Kota Surabaya periode 2022 -2026 ini digunakan sebagai pedoman didalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2016-2021 meliputi:

- a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
- c. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Terdapat berbagai peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran. Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten/ Kota mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terkait ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan yang memayungi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 mengacu kepada peraturan terbaru yakni peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Selain EPPD, dikenal pula Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPPD. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan

sistem pengukuran kinerja yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait dengan sistem pengukuran kinerja maka akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 masih menunggu petunjuk teknis untuk lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sub bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyesuaian (reviu) Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

1.3.1 Maksud

Maksud penyesuaian (reviu) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (5 tahun) dan perubahan - perubahan dalam pelaksanaannya;
- b. Menyelaraskan rencana strategis Kota Surabaya dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, evaluasi kinerja tahun lalu, serta regulasi peraturan perundang - undangan menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyesuaian (reviu) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

2.1.1. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, khususnya dalam bidang penanaman modal dan perindustrian.

2.1.2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;

- h. Pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh Pejabat Fungsional yang diberi tambahan sebagai Sub Koordinator.

1.3. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;

- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas

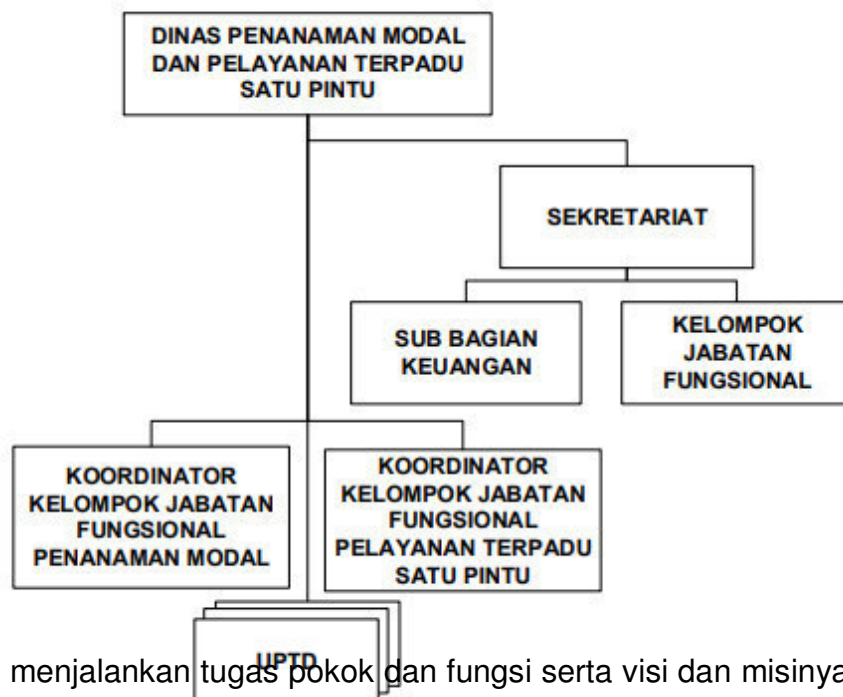
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Sekretariat ditetapkan oleh Walikota.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus

melakukan perbaikan kinerjanya terutama dalam hal akses perizinan. Dalam upayanya meningkatkan pelayanan perijinan dan non perijinan Badan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjelaskan Sumber memiliki berbagai sumber daya baik yang berupa manusia maupun yang berupa asset/modal.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Juni 2021 adalah sebanyak 43 orang dan tenaga kontrak 109 orang.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

Berdasarkan kedudukannya dalam organisasi, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dapat dilihat pada lampiran 1.

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menurut status, pangkat dan golongan dapat dilihat pada lampiran 2.

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki tingkat pendidikan yang variatif mulai mulai tingkat Pendidikan Dasar hingga Pasca Sarjana. Rincian komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

2.2.2. Asset/Modal

Asset/Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri atas gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana diuraikan pada lampiran 4.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) atau yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile pada tanggal 14 Maret 2013. Layanan yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile ini diyakini akan menambah jumlah investasi di Surabaya, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi dan sekarang dalam tahapan integrasi dengan OSS (Online Single Submission) sebagaimana diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. .

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang takterpisahkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya juga memberikan gambaran semangat Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tujuan : Peningkatan sistem manajemen city logistik	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan perdagangan	N/A	✓	N/A	5.59%	5.59%	5.59%	N/A	N/A	4.89%	7.56%	7.62%	N/A	N/A	87.43 %	135.26 %	136.29 %	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatkan Investasi Pendukung Logistik	Peningkatan investasi fasilitas pendukung logistik	N/A	N/A	N/A	6%	12%	18%	N/A	N/A	20.00%	20%	40.00%	N/A	N/A	100.00 %	166.67 %	222.22 %	N/A	N/A
	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	N/A	N/A	N/A	18%	24%	30%	N/A	N/A	50.00 %	100%	200.00 %	N/A	N/A	277.78 %	416.67 %	666.67 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Temu Usaha Logistik	Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Temu Usaha Logistik	Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha logistik	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Temu Usaha Fasilitas Pendukung	Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	g Logistik																			
	Tujuan : Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	N/A	✓	N/A	5%	5%	5%	N/A	N/A	11.88%	5.49%	21.57%	N/A	N/A	237.55 %	109.71 %	431.46 %	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	N/A	N/A	N/A	21 ijin	22ijin	22ijin	N/A	N/A	44.00ijin	122ijin	47.00ijin	N/A	N/A	209.52 %	554.55 %	213.64 %	N/A	N/A
	Program Peningkatan iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	N/A	N/A	N/A	8%	12%	16%	N/A	N/A	14.16 %	20.59%	27.89%	N/A	N/A	177.06 %	171.61 %	174.3%	N/A	N/A
		Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	N/A	N/A	N/A	12%	18%	24%	N/A	N/A	80.49 %	65.85%	89.02%	N/A	N/A	670.73 %	365.85 %	370.93 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	N/A	N/A	N/A	244 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	244 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengendalian	Jumlah laporan	N/A	N/A	N/A	4 doku	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokume	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	ian Penanaman Modal	pengendalian penanaman modal				men					n									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	5 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi	Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi	Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	N/A	N/A	N/A	N/A	500 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	500 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan	Jumlah dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokum	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	an Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya					en														
	Kegiatan : Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	105 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	105.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	375 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	347 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	92.53%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Monitoring Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	2750 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	2750 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengelolaan Data Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	33729 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	38583 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	114.39 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pendampingan Perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	396 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	396 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Penanaman Modal	didampingi																			
	Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	10 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	11 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	110.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	500 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2800 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	2800 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi	Jumlah promosi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	garaan Promosi Investasi	investasi yang dilaksanakan																			
	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34403 data	N/A	N/A	N/A	N/A	41400 data	N/A	N/A	N/A	N/A	120.34 %	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pembinaan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	205 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	102.50 %	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pendampingan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	400 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	
	Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	
	Tujuan : Meningkatkan	Nilai Kepuasan	N/A	✓	N/A	76%	76%	76%	N/A	N/A	75.30%	83.69%	85.18%	N/A	N/A	99.08 %	110.11 %	112.08 %	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	kualitas pelayanan publik	Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan																		
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas pelayanan perijinan	Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	N/A	N/A	N/A	73%	73.5%	74%	N/A	N/A	79.68%	86.29%	80.05%	N/A	N/A	100.00 %	117.4%	108.18 %	N/A	N/A
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	74.33 %	84.05%	86.37%	N/A	N/A	103.24 %	113.58 %	113.65 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	N/A	N/A	N/A	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	219 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	73.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	100 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	N/A	N/A	N/A	60000 berkas	N/A	N/A	N/A	N/A	67746 berkas	N/A	N/A	N/A	N/A	112.91 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibina	N/A	N/A	N/A	130 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	87 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	66.92 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	N/A	N/A	N/A	500 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	517 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	103.40 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	N/A	N/A	N/A	73 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	72 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	98.63 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada	Jumlah penyampaian informasi yang dilakukan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)																				
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	100 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengawasan Perijinan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi usahanya	N/A	N/A	N/A	N/A	10340 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11191 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	108.23 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah peserta pembinaan layanan perizinan dan non perizinan yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	260 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	265 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	101.92 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	500 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	554 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	110.80 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Bimtek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek Informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	200 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	217 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	108.50 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Industri																			
	Kegiatan : Pelayanan PTSP	N/A	N/A	N/A	N/A	67000 ijin	N/A	N/A	N/A	N/A	112218 ijin	N/A	N/A	N/A	N/A	167.49 %	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pendataan dan pengawasan kepemilikan / penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Bimtek Penyusunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Laporan Industri																			
	Kegiatan : Bimtek Perizinan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90000 berkas	N/A	N/A	N/A	N/A	117456 berkas	N/A	N/A	N/A	N/A	130.51 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	550 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	550 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengawasan Perijinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	10315 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.15 %	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Industri dan Tanda Daftar Perusahaan																			
	Kegiatan : Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	24 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan : Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	N/A	✓	N/A	62%	64%	66%	N/A	N/A	67.64%	78.26%	82.65%	N/A	N/A	109.10 %	122.28 %	125.23 %	N/A	N/A
	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	N/A	✓	N/A	90.84 %	91.53 %	91.96%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00 %	N/A	N/A	110.08 %	109.25 %	108.74 %	N/A	N/A
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	✓	N/A	76%	77%	78%	N/A	N/A	75.30%	79.41%	82.61%	N/A	N/A	99.08 %	103.13 %	105.91 %	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00 %	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00 %	N/A	N/A
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00 %	N/A	N/A	100.00 %	100%	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	99.38%	N/A	N/A	100.00 %	100%	99.38%	N/A	N/A
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	72.67 %	78.97%	82.76%	N/A	N/A	100.93 %	106.72 %	108.89 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	271.1 %	N/A	N/A	N/A	N/A	271.10 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	jasa perkantoran																		
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	98.81%	N/A	N/A	100.00 %	100%	98.81%	N/A	N/A
	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	N/A	N/A	N/A	144 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	144 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	70 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	189 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	270.00 %	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A
	Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp63.637.817.362.390	Rp74.719.784.275.973	N/A	N/A	N/A	64081289710388.7rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.7rupiah	N/A
	Sasaran : Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	24%	N/A	N/A	N/A	24.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124.34%	N/A
	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00%	42,00 %	N/A	N/A	N/A	42.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105.54%	N/A
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3500 perusahaan	3500 perusahaan	N/A	N/A	N/A	2102 perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.10%	N/A
	Kegiatan : Pengelola	Jumlah data investasi yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41751 data	45151 data	N/A	N/A	N/A	44839 data	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107.40%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	an Data Investasi	dikelola																			
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00%	24,00%	N/A	N/A	N/A	24.9%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124.51%	N/A
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112.50%	N/A
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	3 kali	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	>70-80	>80-90	N/A	N/A	N/A	76.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
	Sasaran : Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	99.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.97%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,00 %	88,00 %	N/A	N/A	N/A	88.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	101.29%	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	100,00 %	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	100,00 %	N/A	N/A	N/A	99.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	99.93%	N/A
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A
	Tujuan :	Nilai	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	86,03%	88,31	N/A	N/A	N/A	86.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	100.02%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat								%										
			N/A	N/A	N/A															
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78	80	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	128.21%	N/A
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72,00%	75,00 %	N/A	N/A	N/A	75.1%	N/A	N/A	N/A	N/A	104.31%	N/A
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	80,00 %	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	128.21%	N/A
	Kegiatan : Pendataan dan Pengawas	Jumlah pendataan dan pengawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	2 kali	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	an Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)																			
	Kegiatan : Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11000 pelaku usaha	11000 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	12509 pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	108.77%	N/A
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60000 berkas	60000 berkas	N/A	N/A	N/A	94367 berkas	N/A	N/A	N/A	N/A	157.28%	N/A
	Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	2 kali	N/A	N/A	N/A	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A
	Kegiatan :	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kali	5 kali	N/A	N/A	N/A	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	3,440,262,915	5,019,849,238	3,665,355,499	N/A	N/A	3,273,236,108	4,597,794,383	3,237,238,493	N/A	N/A	95.14%	91.59%	88.32%	N/A	N/A	3.27%	-0.55%
Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	380,236,400	220,566,434	171,890,607	N/A	N/A	368,074,093	215,974,691	154,536,154	N/A	N/A	96.80%	97.92%	89.90%	N/A	N/A	-27.40%	-29.01%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	145,512,504	173,892,917	0	N/A	N/A	137,221,096	147,308,955	0	N/A	N/A	94.30%	84.71%	0.00%	N/A	N/A	-50.00%	-50.00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,677,963,390	1,670,073,332	1,971,840,563	N/A	N/A	1,474,692,585	1,436,003,202	1,845,977,145	N/A	N/A	87.89%	85.98%	93.62%	N/A	N/A	8.76%	12.59%
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	6,280,079,163	7,526,176,130	7,377,049,893	N/A	N/A	5,819,611,338	7,033,488,471	6,842,031,162	N/A	N/A	92.67%	93.45%	92.75%	N/A	N/A	8.73%	8.78%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	326,464,393	375,496,004	895,863,464	N/A	N/A	276,969,871	311,973,379	739,630,554	N/A	N/A	84.84%	83.08%	82.56%	N/A	N/A	87.21%	83.52%
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan	N/A	N/A	N/A	5,754,737,487	N/A	N/A	N/A	N/A	5,588,767,967	N/A	N/A	N/A	N/A	97.12%	N/A	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal																	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	1,236,033,735	N/A	N/A	N/A	N/A	1,138,045,294	N/A	N/A	N/A	N/A	92.07%	N/A	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	1,768,842,916	N/A	N/A	N/A	N/A	1,617,562,860	N/A	N/A	N/A	N/A	91.45%	N/A	-	-
Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	1,189,112,858	N/A	N/A	N/A	N/A	1,134,072,721	N/A	N/A	N/A	N/A	95.37%	N/A	-	-
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	N/A	N/A	N/A	769,925,057	N/A	N/A	N/A	N/A	699,968,751	N/A	N/A	N/A	N/A	90.91%	N/A	-	-
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	23,296,619	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	N/A	N/A	N/A	N/A	11,772,125	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	390,403,592	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Promosi Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	534,650,666	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Perekonomian Dan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,683,202,349	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	532,427,102	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pelayanan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	3,781,811,018	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	12,454,447,272	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	1,509,492,751	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Renstra Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada lima tahun mendatang.

2.4.1 Analisis Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dalam berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Tabel TC27 berikut menampilkan komparasi capaian sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) terhadap sasaran Renstra Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (Renstra SKPD Provinsi) dan sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Renstra K/L).

Tabel 2.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten /Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	124.34%	Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal

Dalam tabel 2.11 tersebut ditunjukkan bahwa pada Tahun 2021, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang berupa Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi telah mencapai **124,34%**. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai realisasi investasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, diantaranya yaitu telah terlaksananya penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan juga layanan melalui sistem *on line* yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*).

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang, sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data spasial lainnya terkait tugas dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kota Surabaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Surabaya

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

berikut adalah rumusan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dalam meningkatkan pelayanannya ke depan:

Peluang

- Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem *on line* yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya
- Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi

Tantangan

- Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : (mengacu pada tabel T-B.35)

Permasalahan :

- Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa
- Perlu peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan non perizinan.

Hambatan :

- Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan dampak pandemi virus Covid-19 yang masih dihadapi Indonesia sehingga berpengaruh terhadap iklim investasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap pelayanan perijinan secara *online*

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanannya ke depan adalah sebagai berikut :

Peluang :

- Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem *online* yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya
- Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi

Tantangan

- Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya

manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perumusan Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diperoleh dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Isu Strategis			
	Dinamika International	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Ketidakpastian mengenai percepatan pemuliahan ekonomi global yang diakibatkan pandemi covid-19	Asosiasi yang berkaitan dengan Perdagangan dan Jasa	Asosiasi yang berkaitan dengan Perdagangan dan Jasa	Kurang kondusifnya iklim investasi dan minat investasi yang diakibatkan pandemic covid-19
2	EoDB (Ease of Doing Business) yang menjadi salah satu penilaian penting di dunia Investasi	MEA (INSW) berupa pelayanan terintegrasi dengan menggunakan sistem elektronik	Kerjasama daerah dengan luar negeri tentang kerjasama investasi	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perijinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

didalam menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk arah pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah maka akan disampaikan faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 (Tabel T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan Dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional	Minat Realisasi Investasi di Kota Surabaya	Belum selesainya pandemi covid-19 yang mempengaruhi ekonomi global	Posisi Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai pintu gerbang akses perdagangan ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Akses data detail perusahaan terhadap realisasi investasi melalui perijinan berusaha	Keterbatasan akses yang diberikan oleh BKPM RI sehubungan dengan belum sempurnanya aplikasi perijinan berusaha	Realisasi investasi dapat di akses secara otomatis dari LKPM yang terintegrasi dari aplikasi perijinan berusaha
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terus berkembangnya data potensi investasi karena perkembangan pelaku usaha yang sangat dinamis	Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor	Adanya data unit pengembangan di Kota Surabaya

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Promosi Penanaman Modal	Perlunya inovasi yang terus dikembangkan dalam pelaksanaan promosi untuk menarik minat investor	Data potensi investasi yang perlu di mutakhirkan sebagai bahan promosi	Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang sudah berkembang
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi yang dihitung dari laporan kegiatan penanaman modal	Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kewajiban usahanya	Realisasi investasi dapat di akses secara otomatis dari LKPM yang terintegrasi dari aplikasi perijinan berusaha
2	Misi 2 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Integritas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan perijinan	Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengenai permasalahan perijinan	Sistem informasi perijinan sudah menggunakan sistem <i>online</i> sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait perijinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang ada sudah melebihi masa manfaat sehingga dibutuhkan peremajaan	Tercukupinya sarana dan prasarana yang ada
	Program Pelayanan Penanaman Modal	sistem aplikasi yang digunakan dalam perijinan	Belum optimal dan terintegrasinya sistem perijinan berusaha dan persyaratan dasar yang disediakan oleh pemerintah pusat	Adanya sistem pendukung yang dikembangkan pemerintah daerah agar pelayanan perijinan dan non perijinan tetap dapat terlaksana

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya akan mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	PMDN lebih memilih wilayah aman yang infrastrukturnya mendukung, tersedianya tenaga kerja terampil, dan produktif.	Infrastruktur transportasi yang kurang memadai dan tenaga kerja yang kurang	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk keluar masuknya perdagangan dan jasa serta pelatihan untuk tenaga kerja yang siap pakai secara professional
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	Pelaku usaha pada saat ini masih <i>wait and see</i> sejalan dengan belum tuntasnya penanganan pandemi	Pandemi Covid-19 yang belum tuntas	Memberikan sosialisasi terkait kemudahan berusaha di Kota Surabaya
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Regulasi perijinan	Masih belum sinkronnya sistem dan peraturan dari pusat ke daerah	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Kurang kondusifnya iklim dan minat investasi	Pandemi Covid-19 yang belum tuntas	Mengembangkan peluang penanaman modal untuk meningkatkan iklim dan minat investasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.	Kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sistem perijinan berusaha yang belum optimal	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kota Surabaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Tabel 3.6
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi faktor internal yaitu :

Kekuatan (*Strength*) :

- a. Kewenangan perijinan dan non perijinan sudah dipusatkan pada satu perangkat daerah melalui PTSP

- b. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- c. Kelengkapan sarana dan prasarana
- d. Tersedianya sistem pelayanan perijinan secara elektronik
- e. Tersedianya pengaduan perijinan secara *online* melalui media sosial dan aplikasi
- f. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- g. Peta Potensi investasi

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Keterbatasan akses yang diberikan oleh BKPM RI sehubungan dengan belum sempurnanya aplikasi perijinan berusaha
- b. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum optimalnya aplikasi perijinan berusaha

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*)

- a. Surabaya sebagai pusat perdagangan Indonesia Timur yang dilengkapi dengan infrastruktur transportasi dan logistik
- b. Sinergi dengan pelaku usaha dan instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan pelayanan perijinan dan optimalisasi pengawasan

Ancaman (*Threats*)

- a. Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19
- b. Belum selesainya sistem perijinan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat
- c. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait perijinan
- d. Ketidaksesuaian perijinan yang diterbitkan dengan eksisting usaha yang ada dilapangan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.1.1 Perumusan Visi

Berdasarkan visi pembangunan Kota Surabaya yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, maka visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Visi

**“Peningkatan Investasi Daerah dan Kemudahan Berusaha
Berbasis Teknologi Informasi”**

4.1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

Berdasarkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dirumuskan, terdapat tiga poin pokok yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu terkait peningkatan investasi, kemudahan berusaha dan penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi sangat didukung dengan kemudahan berusaha yang akan diberikan kepada perindustrian- perindustrian dalam mengajukan izin investasi di wilayah Kota Surabaya. Kemudahan berusaha tersebut terkait dengan cepatnya proses pelayanan, persyaratan yang mudah dan juga jelasnya prosedur yang diberikan kepada masyarakat.

4.1.3 Perumusan Misi

Berdasarkan misi pembangunan Kota Surabaya yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Misi

- a. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
- b. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang

4.2.1 Perumusan Tujuan

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah disusun, maka dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

a. Meningkatkan nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mendukung misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif dilakukan untuk mendukung misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.2.2 Perumusan Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas, maka dapat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN

Sasaran meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN ini didapatkan dari realisasi investasi diukur melalui peningkatan jumlah ijin yang masuk di Kota Surabaya.

b. Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah

Sasaran mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah merupakan hal yang di harapkan dari tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif sehingga dapat menunjang pelayanan di Kota Surabaya.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi.

Berikut ini akan ditampilkan ringkasan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah melalui Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	88,31 %	89,23 %	90,16 %	91,08 %	92,01 %
1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,73	86,05	87,39	88,75	90,13

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
2	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	4,60 %	5,50 %	6,30 %	6,90 %	7,40 %
2.1	Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN	Nilai Investasi Daerah	45 Triliyun Rupiah	47.5 Triliyun Rupiah	50.5 Triliyun Rupiah	54 Triliyun Rupiah	58 Triliyun Rupiah

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Perumusan Strategi

a. Strategi *Strengths-Opportunities* (SO)

Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Strategi SO yang digunakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi di luar pemerintahan di bidang penanaman modal
2. Melakukan updating peta potensi investasi

b. Strategi *Strengths-Threats* (ST)

Strategi ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Strategi ST yang digunakan adalah:

1. Menangani ketidaksesuaian kepemilikan perijinan dengan meningkatkan kualitas SDM yang menangani perijinan dan non perijinan
2. Meningkatkan kewenangan PTSP dalam sosialisasi pemanfaatan perijinan *online*

c. Strategi *Weakness-Opportunities* (WO)

Strategi WO adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi WO yang digunakan adalah:

1. Melibatkan instansi di luar pemerintahan dalam pengoptimalan

pengawasan kegiatan penanaman modal

2. Melakukan pemetaan pelaku usaha di sektor pendukung logistik sebagai dasar pembentukan potensi area logistik

d. **Strategi *Weakness-Threats* (WT)**

Strategi WT adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi WT yang digunakan adalah:

1. Melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam perijinan demi meminimalisir ketidaksesuaian perijinan
2. Peningkatan akses pengaduan masalah perijinan untuk menunjang proses pengawasan kegiatan penanaman modal

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Surabaya yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan, sekaligus menyentuh masyarakat di segala level ekonomi dan social secara berkelanjutan

5.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pelayanan. Strategi juga memperhatikan faktor internal dan eksternal lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam memberikan pelayanan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator.

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, perangkat daerah mengambil suatu kebijakan yang merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat diketahui Tema Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya..

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan			
MISI I : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN	Memudahkan masyarakat dalam melakukan izin berusaha di Kota Surabaya	Mempercepat proses izin berusaha yang masuk di Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan kebijakan yang berlaku
MISI IV : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasana perangkat daerah untuk menunjang kualitas pelayanan publik yang baik	Pemeliharaan sarana dan prasana untuk dapat digunakan dengan baik
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui SDM yang baik dan jujur dalam rangka pelayanan publik	Pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2026.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mempunyai Indikator yaitu Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan Penanaman modal memiliki indikator 2 Indikator yaitu Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal dan Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki indikator jumlah investor PMA/PMDN.

4. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal memiliki indikator Persentase Jumlah Calon Investor / Investor yang mempunyai Minat Berinvestasi.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, seperti tersebut pada tabel di bawah ini, bahwa lokasi indikatif pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Genteng Surabaya.

Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun kedepan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh digunakan untuk mendanai 6 program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari program-program tersebut.

Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun. Sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif			Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05 %	88,31 %	Rp 18.709.599.016	89,23 %	Rp 19.516.990.021	90,16 %	Rp 19.768.904.201	91,08 %	Rp 20.800.598.397	92,01 %	Rp 21.716.946.561	92,01 %	Rp 21.716.946.561	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,72	84,73	Rp 14.163.034.181	86,05	Rp 14.685.552.631	87,39	Rp 15.045.387.913	88,75	Rp 15.437.187.863	90,13	Rp 15.852.454.611	90,13	Rp 15.852.454.611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88,12 %	89 %	Rp 14.163.034.181	90 %	Rp 14.685.552.631	91 %	Rp 15.045.387.913	92 %	Rp 15.437.187.863	93 %	Rp 15.852.454.611	93 %	Rp 15.852.454.611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Rp 12.271.579.880	100 %	Rp 12.578.369.377	100 %	Rp 12.892.828.611	100 %	Rp 13.215.149.327	100 %	Rp 13.545.528.060	100 %	Rp 13.545.528.060	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Rp 12.271.579.880	100 %	Rp 12.578.369.377	100 %	Rp 12.892.828.611	100 %	Rp 13.215.149.327	100 %	Rp 13.545.528.060	100 %	Rp 13.545.528.060	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Daerah	100 %	100 %	Rp 1.891.454.301	100 %	Rp 2.107.183.254	100 %	Rp 2.152.559.302	100 %	Rp 2.222.038.536	100 %	Rp 2.306.926.551	100 %	Rp 2.306.926.551	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100 %	100 %	Rp 177.880.908	100 %	Rp 182.598.752	100 %	Rp 179.401.070	100 %	Rp 180.186.668	100 %	Rp 180.989.790	100 %	Rp 180.989.790	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	Rp 1.713.573.393	100 %	Rp 1.924.584.502	100 %	Rp 1.973.158.232	100 %	Rp 2.041.851.868	100 %	Rp 2.125.936.761	100 %	Rp 2.125.936.761	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Pelayanan Penanaman Modal	90 %	90 %	Rp 4.546.564.835	92 %	Rp 4.831.437.390	94 %	Rp 4.723.516.288	96 %	Rp 5.363.410.534	98 %	Rp 5.864.491.950	98 %	Rp 5.864.491.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	100 %	Rp 4.546.564.835	100 %	Rp 4.831.437.390	100 %	Rp 4.723.516.288	100 %	Rp 5.363.410.534	100 %	Rp 5.864.491.950	100 %	Rp 5.864.491.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	60.000 berkas	80.000 berkas	Rp 4.546.564.835	85.000 berkas	Rp 4.831.437.390	90.000 berkas	Rp 4.723.516.288	95.000 berkas	Rp 5.363.410.534	100.000 berkas	Rp 5.864.491.950	100.000 berkas	Rp 5.864.491.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11.000 pelaku usaha	11.000 pelaku usaha		11.500 pelaku usaha		11.500 pelaku usaha		12.000 pelaku usaha		12.000 pelaku usaha		12.000 pelaku usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11.000 Pelaku Usaha	11.000 Pelaku Usaha	Rp 832.821.644	11.500 Pelaku Usaha	Rp 943.454.043	11.500 Pelaku Usaha	Rp 990.450.385	12.000 Pelaku Usaha	Rp 1.039.930.753	12.000 Pelaku Usaha	Rp 1.092.026.911	12.000 Pelaku Usaha	Rp 1.092.026.911	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	60.000 berkas	80.000 berkas	Rp 3.713.743.191	85.000 berkas	Rp 3.887.983.347	90.000 berkas	Rp 3.733.065.903	95.000 berkas	Rp 4.323.479.781	100.000 berkas	Rp 4.772.465.039	100.000 berkas	Rp 4.772.465.039	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan			Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2,71 %	4,60 %	Rp 1.981.691.940	5,50 %	Rp 2.326.398.286	6,30 %	Rp 2.427.684.400	6,90 %	Rp 2.715.424.981	7,40 %	Rp 2.837.225.767	7,40 %	Rp 2.837.225.767	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN			Nilai Investasi Daerah	22 Triliyun Rupiah	45 Triliyun Rupiah	Rp 1.981.691.940	47,5 Triliyun Rupiah	Rp 2.326.398.286	50,5 Triliyun Rupiah	Rp 2.427.684.400	54 Triliyun Rupiah	Rp 2.715.424.981	58 Triliyun Rupiah	Rp 2.837.225.767	58 Triliyun Rupiah	Rp 2.837.225.767	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	N/A	150 Perusahaan	Rp 441.981.664	170 Perusahaan	Rp 577.939.876	190 Perusahaan	Rp 584.238.272	210 Perusahaan	Rp 635.019.971	230 Perusahaan	Rp 665.825.252	230 Perusahaan	Rp 665.825.252	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	0 %	70 %	Rp 441.981.664	72 %	Rp 577.939.876	74 %	Rp 584.238.272	76 %	Rp 635.019.971	78 %	Rp 665.825.252	78 %	Rp 665.825.252	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 441.981.664	4 Dokumen	Rp 577.939.876	4 Dokumen	Rp 584.238.272	4 Dokumen	Rp 635.019.971	4 Dokumen	Rp 665.825.252	4 Dokumen	Rp 665.825.252	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	N/A	50 %	Rp 606.456.014	55 %	Rp 658.709.199	55 %	Rp 684.022.654	60 %	Rp 694.510.379	60 %	Rp 738.216.183	60 %	Rp 738.216.183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	0 Calon Investor / Investor	200 Calon Investor / Investor	Rp 606.456.014	250 Calon Investor / Investor	Rp 658.709.199	250 Calon Investor / Investor	Rp 684.022.654	300 Calon Investor / Investor	Rp 694.510.379	300 Calon Investor / Investor	Rp 738.216.183	300 Calon Investor / Investor	Rp 738.216.183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	3 Pameran	Rp 606.456.014	3 Pameran	Rp 658.709.199	3 Pameran	Rp 684.022.654	3 Pameran	Rp 694.510.379	3 Pameran	Rp 738.216.183	3 Pameran	Rp 738.216.183	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	42,41 %	42 %	Rp 644.711.565	43 %	Rp 784.095.808	44 %	Rp 907.688.445	45 %	Rp 1.005.605.182	46 %	Rp 1.056.164.066	46 %	Rp 1.056.164.066	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	0 perusahaan	1.100 perusahaan	Rp 644.711.565	1.200 perusahaan	Rp 784.095.808	1.300 perusahaan	Rp 907.688.445	1.400 perusahaan	Rp 1.005.605.182	1.500 perusahaan	Rp 1.056.164.066	1.500 perusahaan	Rp 1.056.164.066	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	75 peserta	190 peserta	Rp 69.892.358	190 peserta	Rp 120.046.330	190 peserta	Rp 217.154.432	190 peserta	Rp 226.104.288	190 peserta	Rp 235.523.669	190 peserta	Rp 235.523.669	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal	450 proyek	500 proyek	Rp 1.734.904	500 proyek	Rp 1.780.294	500 proyek	Rp 43.497.968	500 proyek	Rp 45.762.732	500 proyek	Rp 48.146.629	500 proyek	Rp 48.146.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	0 proyek	170 proyek	Rp 573.084.303	170 proyek	Rp 662.269.184	170 proyek	Rp 647.036.045	170 proyek	Rp 733.738.162	170 proyek	Rp 772.493.768	170 proyek	Rp 772.493.768	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	1.125 perusahaan	2.700 perusahaan		2.700 perusahaan		2.700 perusahaan		2.700 perusahaan		2.700 perusahaan		2.700 perusahaan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	N/A	20 lembaga	Rp 288.542.697	20 lembaga	Rp 305.653.403	20 lembaga	Rp 251.735.029	20 lembaga	Rp 380.289.449	20 lembaga	Rp 377.020.266	20 lembaga	Rp 377.020.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	0 perusahaan	300 perusahaan	Rp 288.542.697	350 perusahaan	Rp 305.653.403	400 perusahaan	Rp 251.735.029	450 perusahaan	Rp 380.289.449	500 perusahaan	Rp 377.020.266	500 perusahaan	Rp 377.020.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data investasi yang dikelola	44.839 data	46.054 data	Rp 288.542.697	46.975 data	Rp 305.653.403	47.914 data	Rp 251.735.029	48.872 data	Rp 380.289.449	49.850 data	Rp 377.020.266	49.850 data	Rp 377.020.266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BAB VII

KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 itu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*Community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan adalah sebagai berikut.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	86,05 %	88,31 %	89,23 %	90,16 %	91,08 %	92,01 %	92,01 %
2	Tujuan Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2,71 %	4,60 %	5,50 %	6,30 %	6,90 %	7,40 %	7,40 %
3	Sasaran Indeks Pelayanan Penanaman Modal	90 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	98 %
4	Sasaran Nilai Investasi Daerah	22 Triliyun Rupiah	45 Triliyun Rupiah	47.5 Triliyun Rupiah	50.5 Triliyun Rupiah	54 Triliyun Rupiah	58 Triliyun Rupiah	58 Triliyun Rupiah
5	Sasaran Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,72	84,73	86,05	87,39	88,75	90,13	90,13

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. untuk mewujudkan Visi dan Misi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Hal yang perlu ditekankan dalam Rencana Strategis ini adalah dianutnya alokasi anggaran program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan (namun tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran Perangkat Daerah) ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ini dibuat semoga bisa dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Surabaya, 16 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



M. Taswin, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196203181990031003